



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2023**



**MANOKWARI, JANUARI 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Seiring dengan terlaksananya program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat di Tahun Anggaran 2023, maka sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaannya perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNNP Papua Barat. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hasil capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran dan indeks capaian kegiatan selama satu tahun.

Dengan tersusunnya LKIP BNN Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dalam memerangi Narkoba dan dapat mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) khususnya di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, 25 Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Papua Barat**



Anak Agung Made Sudana, S.H., S.I.K., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....	2
D. Struktur Organisasi .....	4
E. Sistematika Penyajian .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. Rencana Program Kerja .....	6
B. Rencana Kerja Tahunan .....	8
C. Perjanjian Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Analisa Capaian Kinerja .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>LAMPIRAN</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerjasama. Melalui kelima Bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. BNNP Papua Barat sebagai unit kerja dari BNN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam lampiran ini.

BNNP Papua Barat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun Anggaran 2023 memiliki sasaran strategis **“Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi Papua Barat”**,

Faktor geografis Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang begitu sulit dijangkau antar Kabupaten/Kota menjadi salah satu kendala yang berkelanjutan dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan kegiatan P4GN. Transportasi darat yang dapat digunakan hanya ke Kabupaten Manokwari Selatan sedangkan daerah lain melewati darat memerlukan usaha lebih karena kondisi jalan dan keamanan. Kemudian untuk menjangkau daerah lain hanya dapat menggunakan pesawat dan kapal laut. Sehingga dalam menerapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memerlukan upaya yang lebih keras lagi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Permasalahan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia di BNNP Papua Barat, Secara keseluruhan jumlah pegawai di BNNP Papua Barat berjumlah 22 pegawai hal ini masih jauh dari jumlah pegawai ideal pada tingkat BNNP sesuai Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/888/XI/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Daftar Nama, Kelas, dan Formasi Jabatan Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dimana di setiap BNNP seharusnya memiliki 153 pegawai.

Beberapa langkah yang telah di tempuh BNNP Papua Barat dalam menghadapi kendala tersebut diatas adalah untuk permasalahan personil staf pelaksana maupun pejabat BNNP Papua Barat telah meminta kepada Biro Kepegawaian BNN, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Polda Papua Barat agar diberikan penambahan personil.

Dari segi sarana dan prasarana BNNP Papua Barat belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga masih harus menyewa ruko dengan biaya yang mahal. Untuk mengatasi hal ini BNNP Papua Barat untuk jangka panjang sedang melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memberi hibah berupa tanah untuk pembangunan Gedung kantor BNNP Papua Barat, kemudian untuk jangka pendek BNNP Papua Barat sedang berupaya melakukan pendekatan kepada instansi lain baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman gedung sementara yang akan digunakan sebagai kantor BNNP Papua Barat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang BNN di daerah maka dibentuk BNN Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dibentuk 34 BNN Provinsi dan salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diubah terakhir dengan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah serta Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, BNNP Papua Barat selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yaitu unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja memiliki kewajiban laporan kinerja.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021;
6. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

### **1. Kedudukan**

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Manokwari, Papua Barat.

- b. BNNP Papua Barat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh seorang Kepala.

## **2. Tugas**

Tugas BNNP Papua Barat yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua Barat.

## **3. Fungsi**

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

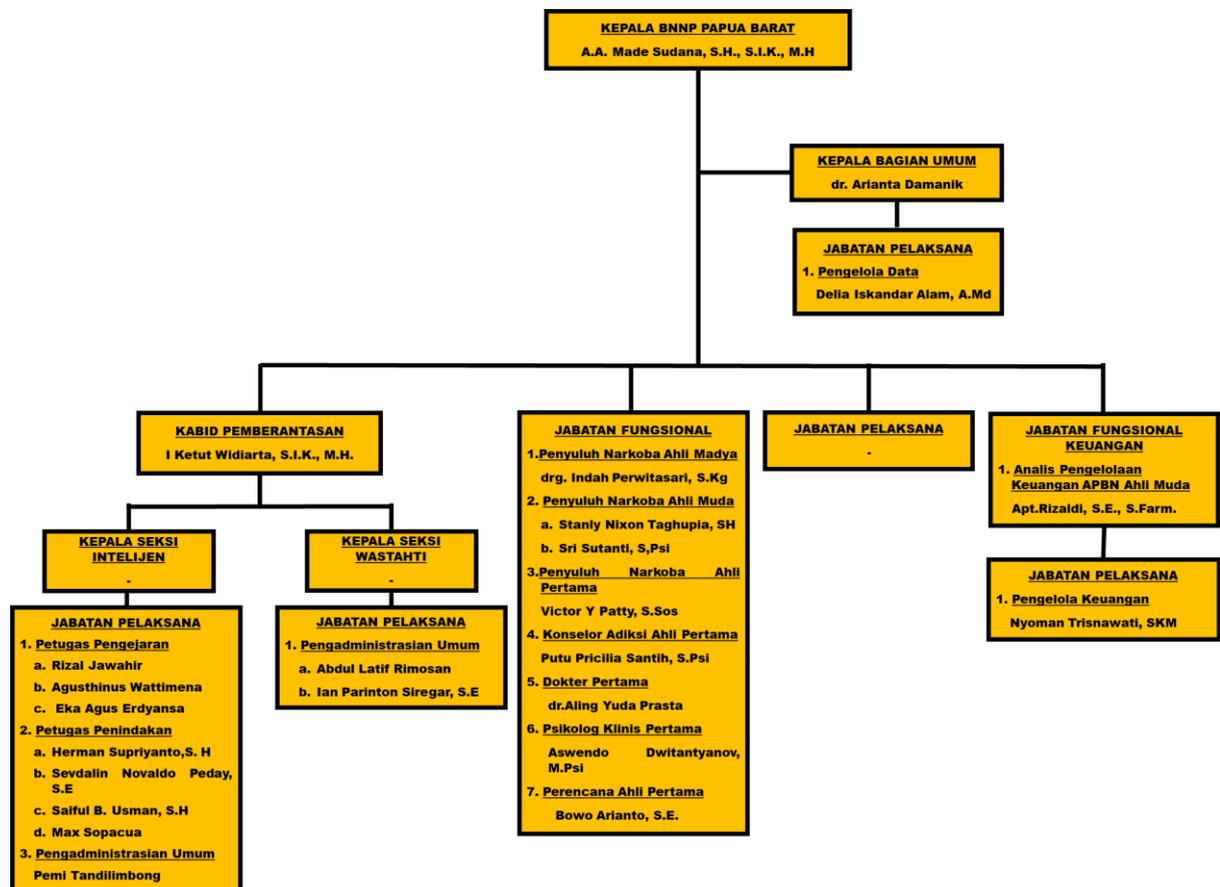
## **4. Kewenangan**

Kewenangan BNNP secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

## D. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di BNNP Papua Barat sebagai berikut :

*Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat*



## E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNNP Jawa Tengah, antara lain Gambaran Umum, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

### BAB II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan tentang Rencana Strategis/Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas tentang penetapan kinerja tahun 2022.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan analisis pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, Permasalahan dan Rekomendasi.

### **BAB IV Penutup**

#### **Lampiran**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Program Kerja

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi 2020-2024 yang mengacu pada visi misi pembangunan sosial **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong**, serta mengacu pada Nawacita Presiden sejalan dengan visi BNN yaitu “terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”. Dengan poin-poin misi, antara lain :

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional;
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Disisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Kontruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarah pada tujuan BNN tahun 2020-2024, yaitu **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba** dan **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas**. Berikut Rencana Program Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2020-2024 :

*Tabel 2.1 Rencana Program Kerja BNNP Papua Barat Tahun 2020-2024*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	7	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	3	5	5	5	5
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	8	4	2	2	2
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkotika Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1	1	1	1	1
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi	-	2.5	2.5	2.5	2.5
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	-	5	10	10	10
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	-	10	25	25	25
6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2	3	2	2	2
		Junlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1	1	1	1	1
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	-	3,2	3,2	3,2	3,2
8	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	7	5	5	5	5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	100	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	88	90	92	94	96
11	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	-	94	96	97	99

## B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2023 terdiri dari 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN). Adapun rincian kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Program Dukungan Manajemen*

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	a.Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp1.265.899.000
		b.Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	Rp1.022.000
2	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	a.Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	Rp27.387.000
3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	a.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Rp55.856.000
4	Penyelenggaraan Tatasahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	a.Layanan Umum	1 Layanan	Rp430.725.000
		b.Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp2.084.619.000
		c.Layanan Sarana Internal	17 Unit	Rp926.608.000
		d.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Rp2.000.000
5	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	a.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	Rp20.134.000

*Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN)*

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Penyelenggaraan Advokasi	a. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga	Rp.40.000.000
		b. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	2 Desa	Rp36.406.000
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	a. Fasilitasi Program Alternatif Development Pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat	Rp130.000.000
3	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	a. Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Laporan	Rp50.000.000
4	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	a. Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	40 Orang	Rp37.117.000
5	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	a. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga	Rp194.820.000
6	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	a. Layanan Assesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	15 Orang	Rp44.025.000
		b. Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	2 Produk	Rp60.000.000
		c. Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotikadan TPPU	5 Orang	Rp42.200.000
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	a. Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	10 Orang	Rp17.375.000

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		b. Tanaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	25 Orang	Rp106.618.000
8	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	a. Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	30 Orang	Rp51.925.000
		b. Layanan SKHPN	100 Orang	Rp78.184.000
		c. Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A	1 Orang	Rp200.000
		d. Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-B	1 Orang	Rp280.000
		e. Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga	Rp59.188.000
		f. Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota	1 Lembaga	Rp9.553.000
		g. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terbentuk	2 Lembaga	Rp59.050.000
9	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	a. Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5 Perkara	Rp404.000.000
10	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	a. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Softskill	1 Lembaga	Rp66.597.000

### C. Perjanjian Kinerja

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dengan indikator sebagai berikut :

*Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori "tinggi" di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori "tinggi" di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi	2,46 Indeks
5	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	63%
6	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	25 Orang
7	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional di Wilayah Provinsi	1 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,30 Indeks
9	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	5 Berkas Perkara
10	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks
11	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	80 Indeks
12	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	92 Indeks

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
13	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Analisis Capaian Sasaran

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 di lingkup BNN Provinsi Papua Barat telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Data capaian kinerja BNNP Papua Barat 2023*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kawasan	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,46 Indeks	2,37 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	63%	98,75%
6	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	25 Orang	25 Orang
7	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit	2 Unit
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,30 Indeks	3,82 Indeks
9	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	5 Berkas Perkara	4 Berkas Perkara
10	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks
11	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	80 Indeks	86,22 Indeks
12	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	92 Indeks	97,56 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
13	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	74,52 Indeks

Berdasarkan perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 maka realisasi pencapaian kinerja selama tahun 2023 untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

<b>1.</b>	<b>Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi</b>
-----------	---

Sasaran Meningkatkan Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan Sofskill kepada SMP/SMU untuk memperoleh Pengembangan Soft Skill di SMK Negeri 6 Kota Sorong melalui media konvensional yaitu melalui Dialog Interaktif dan Penyelenggaraan Informasi Edukasi pada berbagai media seperti Media Cetak, Talkshow, Media Luar Ruangan

#### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 0 (nol) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.2 Data capaian kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0%

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Pengukuran menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

#### **b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilakukan secara nasional yang perhitungannya dilakukan terpusat melalui aplikasi [www.dektari.bnn.go.id](http://www.dektari.bnn.go.id) dengan indikator penilaian yaitu Nilai Evaluasi Independen, nilai ADS dan nilai data sekunder Sekolah. Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2023, BNNP Papua Barat memperoleh Indeks sebesar 45,00 untuk Tahun 2023 dengan kategori “sangat rendah”, dimana BNNP Papua Barat mengalami penurunan indeks dari Tahun 2022 yang memperoleh indeks sebesar 50,25. Berikut perbandingan sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya :

*Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kab/Kota	0 Kab/Kota				

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1} \times 100 = 0\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dapat mencapai target. Sedangkan capaian tahun 2023 tidak sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Kabupaten/Kota, Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) kinerja tahun 2023 BNNP Papua Barat dengan realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) secara nasional yaitu dektari rata-rata Nasional sebesar

52,70 sedangkan nilai dektari Provinsi Papua Barat hanya sebesar 45,00 berkategori “sangat rendah” dengan persentase persentase capaian 85,38%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.5 Tingkat efisiensi kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	0	99,82	-99,82

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -99,82%.

### c. Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahguna Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi dikarenakan kegiatan informasi dan edukasi mengalami beberapa kendala seperti :

- 1) Adanya *Automatic Adjustment* berakibat pada pengurangan jumlah kegiatan Informasi dan Edukasi di BNNP Papua Barat;
- 2) Berkurangnya jumlah kegiatan berdampak pada rendahnya rata-rata nilai sekunder, evaluasi dependen dan Nilai ADS dimana jumlah media yang dilaksanakan oleh BNNP menjadi salah satu persentasae dalam pengukuran Nilai DEKTARI;
- 3) Pemahaman petugas terhadap proses pengisian dektari yang masih belum merata terutama terhadap data kegiatan positif sekolah penerima program Softskill.

#### **d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan capaian Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meminimalisir jumlah Automatic Adjustment agar tidak dibebankan pada kegiatan informasi dan edukasi / akun 5936;
- 2) Memperbanyak jumlah kegiatan DIPA media informasi dan edukasi di BNNP Papua Barat untuk menaikkan nilai ADS guna menunjang perhitungan Nilai Dekteri tahun 2024. (Kegiatan Non DIPA tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan Aplikasi DEKTARI);
- 3) Selektif dalam pengisian aplikasi dektari pada kuesioner evaluasi dependen yang diberikan kepada pelajar tahun 2024.
- 4) Selektif dalam memilih profil sekolah penerima pelatihan pengembangan softskil 2024..

<b>2.</b>	<b>Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi</b>
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari, Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu rapat koordinasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba untuk menentukan sasaran keluarga yang akan diintervensi serta mengadvokasi stakeholder yang bersangkutan (BKKBN, PKK, DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Kampung DLL) untuk ikut bekerjasama dalam program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba dan intervensi pelaksanaan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

#### **a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi adalah 1

(satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.6 Data capaian kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

#### **b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu BNNP memilih desa (Desa Bersinar) yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Kelurahan Wosi). Pengukuran DEKTARA dilakukan pada 10 Keluarga di Kelurahan Wosi yang menerima Intervensi ketahanan Keluarga Anti Narkoba kemudian diolah menggunakan Aplikasi Dektara, Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN tanggal 27 Desember 2022 perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2023 dimana BNNP Papua Barat memperoleh Indeks sebesar 76,696 pada Tahun 2022 dengan kategori “tinggi”, hasil tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2022 yang mendapatkan indeks 93,839. Adapun klasifikasi penghitungan Dektara yaitu :

- 1) Nilai 88,31 – 100 masuk dalam Kategori Sangat Tinggi.
- 2) Nilai 76,61 – 88,30 masuk dalam Kategori Tinggi.
- 3) Nilai 65,00 – 76,60 masuk dalam Kategori Rendah.

4) Nilai 25,00 – 64,99 masuk dalam Kategori Sangat Rendah

Berikut perbandingan sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya :

*Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kab/Kota					

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 5 keluarga dalam 1 Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :  
Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap

Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) BNNP Papua Barat Tahun 2023 dengan Nasional yaitu nilai dektara rata-rata Nasional sebesar 85,389 sedangkan nilai dektara Provinsi Papua Barat sebesar 76,696 dengan persentase capaian 89,81%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.9 Tingkat efisiensi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi	100	98,70	1,3

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,3%.

### c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi mencapai 100% adalah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BNNP Papua Barat telah dilaksanakan dengan baik dan optimal dalam pendampingan serta bimbingan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga anti narkoba seperti :

- 1) Pelaksanaan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti narkoba berpedoman sesuai dengan juknis dan modul dari pembina fungsi Deputi Pencegahan;
- 2) Adanya pelatihan fasilitator anak, fasilitator orang tua dan fasilitator keluarga yang diberikan kepada penyuluh narkoba di BNNP;
- 3) Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui

pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba tidak terkena *Automatic Adjustment*.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha mempertahankan keberhasilan pencapaian target Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “tinggi” di Wilayah Provinsi, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempelajari Juknis dan Modul terbaru yang akan dikeluarkan oleh pembina fungsi untuk melaksanakan kegiatan tahun 2024;
- 2) Melaksanakan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba sesuai dengan modul terbaru;
- 3) Selektif dalam menerapkan *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2024 agar tidak berdampak pada kegiatan utama intervensi ketahanan keluarga anti narkoba.

**3. Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi**

Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) Kabupaten/Kota dan capaian 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.10 Data capaian kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	100%

Definisi operasional dari Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variable sebagai berikut :

- 1) SDM : adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan pegiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- 2) Metode : adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan
- 3) Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- 4) Anggaran : adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- 5) Material : adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- 6) Sistem (Kebijakan) : adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- 7) Aktivitas : adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Pegiat Anti Narkoba.

#### **b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capain sasaran Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dengan pengisian Kuisioner Indeks Kemandirian Partisipasi oleh pegiat anti narkoba dari Instansi dalam kegiatan pemberdayaan anti narkoba yang telah dilaksanakan BNNP Papua Barat. Kriteria IKP dalam Lembaga mempunyai Karakteristik yang berbeda, penilaian IKP didasarkan tabel berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Setelah penyebaran kuesioner dan pengolahan data, sehingga didapatkan indeks dengan rincian sebagai berikut :

NO	INSTANSI	NILAI IKP	KATEGORI IKP	KRITERIA
<b>LINGKUNGAN PEMERINTAH</b>				
1	KPP PRATAMA MANOKWARI	3,84	A	SANGAT MANDIRI
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI MANOKWARI	3,80	A	SANGAT MANDIRI
3	KANTOR STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MANOKWARI	3,56	A	SANGAT MANDIRI
4	KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	3,24	B	MANDIRI
5	BASARNAS	3,12	B	MANDIRI
TOTAL		<b>3,5</b>		
<b>LINGKUNGAN PENDIDIKAN</b>				
1	POLTEKES KEMENKES SORONG	3,48	A	SANGAT MANDIRI
2	UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA	3,44	A	SANGAT MANDIRI
3	SMK N 1 KOTA SORONG	3,16	B	MANDIRI
4	SMA USDATARA KOTA SORONG	3,16	B	MANDIRI
5	SMK N 5 KOTA SORONG	2,64	B	MANDIRI
TOTAL		<b>3,17</b>		
<b>RATA -RATA IKP</b>		<b>3,33</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

Dari data diatas capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2023 sebesar 3,33 dengan kriteria “sangat mandiri”, capaian tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,04 dari capaian tahun 2022 dengan indeks 3,37 dalam 1 kabupaten/kota dengan kriteria “sangat mandiri”. Berikut perbandingan sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya :

*Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kab/Kota					

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Kabupaten/Kota dengan kategori tinggi. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipan (IKP) tahun 2023 antara Nilai Indeks Nasional sebesar 3,5 dengan Nilai Indeks Provinsi Papua Barat sebesar 3,33 dengan persentase capaian 95,14%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.13 Tingkat efisiensi kinerja indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi	100	99,85	0,15

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,15%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “mandiri” di Wilayah Provinsi karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama tim serta upaya untuk terus menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya P4GN secara mandiri dan berkelanjutan

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong instansi/lembaga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui test urine secara mandiri untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba.
- 2) Mendorong instansi/lembaga membuat penggiat anti narkoba di lingkungannya masing-masing
- 3) Meningkatkan peran instansil/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi aktif mendukung program P4GN.
- 4) Meningkatkan pembinaan berkelanjutan bagi para penggiat yang telah dibentuk dengan cara menjaga agar kelangsungan program mandiri yang telah dilaksanakan oleh para penggiat P4GN dapat dipertahankan dan ditingkatkan pelaksanaannya secara berkelanjutan

## 4.

### Indikator Kinerja : Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dilaksanakan di Kelurahan Malanu Kota Sorong. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu

1. Raker Dalam Rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder
2. Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan
3. Bimtek Pendampingan Dalam Rencana Aksi Dayatif Pada Kawasan Rawan Narkoba
4. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong.

#### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada” adalah 1 (satu) Kawasan dan capaian 1 (satu) Kawasan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Malanu Kota Sorong dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.14 Data capaian kinerja kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

Definisi Operasional Pemberdayaan alternatif masyarakat anti Narkoba pada kawasan rawan adalah kawasan rawan yang telah ditentukan dan diintervensi oleh program pemberdayaan alternatif ,sehingga mengalami

perubahan status kerawanan dan untuk ditingkatkan kapasitas baik individu, lembaga, lingkungan dan usahanya agar berdaya mengubah lingkungannya menjadi bersih dan bebas narkoba dan aman untuk beraktifitas.

**b. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran status keterpulihan kawasan rawan melalui penyebaran kuisisioner indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba ( IKKR ) dengan 3 variabel dan 20 pertanyaan. Penilaian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan memlaui penyebaran kuisisioner dengan kriteria sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Dari data yang sudah di olah didapatkan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan dengan Nilai Interval sebesar 2,37 atau Waspada sehingga tercapai target Tahun 2023 Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Bahaya” menjadi “Waspada” yaitu 1 kabupaten/kota, capaian tersebut sama dengan capaian dari tahun 2022 dengan capaian 1 kabupaten/kota. Berikut perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kab/ Kota					

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Bahaya” menjadi “Waspada” selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Kabupaten/Kota dari “Bahaya” menjadi “Waspada”. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.16 Perbandingan realisasi kinerja kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada” Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) tahun 2023 antara Nilai Indeks Nasional sebesar 2,85 dengan Nilai Indeks Provinsi Papua Barat sebesar 2,67 dengan persentase capaian 93,68%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.17 Tingkat efisiensi kinerja kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status dari “bahaya” menjadi “waspada”	100	95,93	4,07

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,07%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah kawasan rawan wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalannya hubungan sinergitas BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama tim serta upaya untuk terus menggerakkan dan mendorong seluruh stakeholder dalam upaya P4GN yang terfokus pada kawasan rawan narkoba.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong seluruh stakeholder dalam intervensi berkelanjutan di kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari narkoba dengan status keterpulihan yang terus menurun ( dari bahaya menjadi waspada).
- 2) Mendorong pembinaan lembaga, pembinaan usaha, pembinaan lingkungan pada kawasan rawan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan guna mempertahankan status keterpulihan yang telah menurun
- 3) Meningkatkan peran seluruh stakeholder pada kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

<b>5.</b>	<b>Indikator Kinerja : Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diIntervensi</b>
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dilaksanakan di Kelurahan Malaingke di Kota Sorong. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Raker Dalam Rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder

2. Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan
3. Bimtek Pendampingan Dalam Rencana Aksi Dayatif Pada Kawasan Rawan Narkoba
4. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi adalah dengan indeks 2,46 (dua koma lima) dan capaian indeks 2,37 (dua koma empat puluh enam) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.18 Data capaian kinerja nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,46 Indeks	2,37 Indeks	96,34%

Definisi Operasional Pemberdayaan alternatif masyarakat anti Narkoba pada kawasan rawan adalah kawasan rawan yang telah ditentukan dan diintervensi oleh program pemberdayaan alternatif ,sehingga mengalami perubahan status kerawanan dan untuk ditingkatkan kapasitas baik individu, lembaga, lingkungan dan usahanya agar berdaya mengubah lingkungannya menjadi bersih dan bebas narkoba dan aman untuk beraktifitas.

**b. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran status keterpulihan kawasan rawan melalui penyebaran kuisisioner indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba ( IKKR ) dengan 3 variabel dan 20 pertanyaan. Penilaian Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan memlaui penyebaran kuisisioner dengan kriteria sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Dari data yang sudah di olah didapatkan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan dengan Nilai Interval sebesar 2,37 atau Waspada, Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang didapat BNNP Papua Barat tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 2,46. Capaian Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mendapatkan nilai sebesar 2,46. Berikut perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.19 Perbandingan realisasi kinerja nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,5 Indeks	2,5 Indeks	2,46 Indeks	3,1 Indeks	2,46 Indeks	2,37 Indeks

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2,37}{2,46} \times 100 = 96,34\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi tidak mencapai target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target nilai 2,5. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.20 Perbandingan realisasi kinerja nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,5 Indeks	2,37 Indeks

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : Perbandingan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) tahun 2023 antara Nilai Indeks Nasional sebesar 2,85 dengan Nilai Indeks Provinsi Papua Barat sebesar 2,67 dengan persentase capaian 93,68%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.21 Tingkat efisiensi kinerja nilai keterpulihan kawasan rawan yang di intervensi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	100	99,85	0,15

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,15%.

**c. Faktor Penyebab Kegagalan**

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Jumlah kawasan rawan wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada karena dalam pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalannya hubungan sinergitas BNNP Papua Barat dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan dan kerjasama tim serta upaya untuk terus menggerakkan dan mendorong seluruh stakeholder dalam upaya P4GN yang terfokus pada kawasan rawan narkoba.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan dan mempertahankan pencapaian target, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong seluruh stakeholder dalam intervensi berkelanjutan di kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari narkoba dengan status keterpulihan yang terus menurun ( dari bahaya menjadi waspada).
- 2) Mendorong pembinaan lembaga, pembinaan usaha, pembinaan lingkungan pada kawasan rawan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan guna mempertahankan status keterpulihan yang telah menurun
- 3) Meningkatkan peran seluruh stakeholder pada kawasan rawan narkoba guna menjadikan kawasan rawan narkoba bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

# 7.

## Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi Adapun petugas berasal dari Kelurahan Wosi dan Kampung Arowi dengan tahapan kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis Petugas IBM
2. Monitoring Rencana Aksi

### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih adalah 10 (sepuluh) orang dan capaian 10 (sepuluh) orang dengan rincian capaian sebagai berikut:

*Tabel 3.22 Data capaian kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan ibm yang terlatih.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Definisi Operasional Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah masyarakat yang ditunjuk langsung oleh pihak kelurahan/ kampung untuk menjadi agen pemulihan di wilayahnya masing-masing dan disahkan dalam SK Lurah/ Kepala Kampung serta mendapatkan bimbingan teknis/ pelatihan mengenai Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan operasional kegiatan hingga pelaporannya. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan metode ceramah, praktik, serta penugasan.

### b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan pre test dan post test pada saat bimbingan teknis untuk mengetahui pemahaman petugas penyelenggara pelayanan IBM (Agen Pemulihan) terkait dengan materi

bimbingan teknis IBM sehingga Agen Pemulihan dapat menjalankan layanan IBM, kemudian didapatkanlah Agen Pemulihan yang terlatih sebanyak 10 orang pada Tahun 2022, hasil tersebut hampir sama dengan capaian Tahun 2021 sebanyak 11 orang Agen Pemulihan yang terlatih. Berikut perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.23 Perbandingan realisasi kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	5 Orang	10 Orang	10 Orang	11 Orang	10 Orang	10 Orang

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{10}{10} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih selaras dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 10 orang. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.24 Perbandingan realisasi kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.25 Tingkat efisiensi kinerja petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	100	100	0,00

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,00%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam kegiatan Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih yaitu:

1. Adanya koordinasi yang baik antara petugas BNNP Papua Barat dan Kelurahan/ Kampung terkait penunjukkan petugas IBM/ AP.
2. Pergantian petugas AP dan tingkat keaktifan petugas IBM/ AP dapat berpengaruh dalam operasional kegiatan IBM kedepannya.
3. Adanya perangkat pelatihan yang sesuai standar/ juknis diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Pada tahun 2024, dalam mencapai target diupayakan penekanan dalam penunjukkan petugas layanan IBM dapat mempertimbangkan faktor keaktifan calon petugas IBM di masyarakat serta riwayat peran sosial individu. Hal ini membutuhkan sinergitas antara BNNP Papua Barat dan pihak kelurahan yang lebih memahami kondisi masyarakatnya. Pelaksanaan kegiatan IBM juga dapat secara matang dalam aspek perencanaan kegiatan sehingga operasional IBM dapat berjalan lebih terencana.

<b>8.</b>	<b>Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis</b>
-----------	--

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Kompetensi Teknis.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Yang Terlatih adalah 25 (dua puluh lima) orang dan capaian 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.26 Data capaian kinerja jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	25 Orang	25 Orang	100%

Difinisi Operasional Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas rehabilitasi baik dari lembaga rehabilitasi milik BNN, LRIP, maupun LRKM yang mendapatkan peningkatan kemampuan/ pelatihan berupa Universal Treatment Curriculum (UTC). Kegiatan UTC 5 dilaksanakan di BNNP Papua Barat selama 38 JP dengan metode ceramah, role play, dan penugasan. Fasilitator dalam kegiatan ini adalah petugas rehabilitasi yang telah mendapatkan sertifikasi ToT UTC 5.

**b. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan pre test dan post test pada saat kegiatan dilaksanakan. Pretest dan posttest dilaksanakan dalam bentuk tes formal untuk menentukan penguasaan petugas terhadap materi dan praktik terkait proses rehabilitasi. kemudian didapatkanlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis sebanyak 25 orang pada Tahun 2023, hasil tersebut mengalami kenaikan dari capaian Tahun 2022 sebanyak 10 orang Agen Pemulihan yang terlatih. Berikut perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya :

*Tabel 3.27 Perbandingan realisasi kinerja petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	10 Orang	10 Orang	25 Orang	10 Orang	10 Orang	25 Orang

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{25}{25} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Tahun 2023 sebanyak 25 orang dan sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 25 orang. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.28 Perbandingan realisasi kinerja petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	25 Orang	25 Orang

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.29 Tingkat efisiensi kinerja petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	100	99,77	0,23

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,23%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor yang berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan ini adalah koordinasi panitia dengan peserta serta fasilitator kegiatan serta adanya perangkat pelatihan yang sesuai standar yang ditentukan.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Pelatihan/ Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi di Tahun 2024 dilaksanakan oleh PPSDM BNN sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antara Deputi Rehabilitasi, PPSDM, dan BNNP Papua Barat terkait keikutsertaan petugas rehabilitasi dari Papua Barat, mengingat faktor mobilisasi/ transportasi peserta ke PPSDM BNN yang dapat menjadi kendala peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan secara menyeluruh.

**9. Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi**

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) lembaga dan capaian 1 (satu) lembaga dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.30 Data capaian kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Definisi Operasional Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi adalah banyaknya fasilitas kesehatan penyelenggara layanan rehabilitasi yang telah dilakukan penilaian untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi Papua Barat.

**b. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran pada kegiatan ini yaitu lembaga baik LRIP maupun LRKM yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap bagi penyalahguna narkoba berdasarkan surat Deputi Rehabilitasi Nomor : B/50/I/DE/RH.02.03/2024/BNN perihal Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi SNI Target Reguler Tahun 2023 menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat telah memenuhi SNI tahun 2023 dengan standar pelayanan memenuhi Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Napza. Sehingga pada tahun 2023 BNNP Papua Barat telah mencapai target 1 Lembaga yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil tersebut sama dengan capaian Tahun 2022 sebanyak 1 lembaga. Berikut perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya :

*Tabel 3.31 Perbandingan realisasi kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Tahun 2023

sebanyak 1 Lembaga sesuai dengan target dari Perjanjian Kinerja, tetapi target tahun 2022 tidak sesuai dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 2 Lembaga karena adanya penyesuaian target dan anggaran. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.32 Perbandingan realisasi kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	2 Lembaga	1 Lembaga

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.33 Tingkat efisiensi kinerja lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	100	99,94	0,06

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,06%.

### c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi yaitu:

- 1) Pendampingan yang berkelanjutan oleh petugas BNNP Papua Barat kepada lembaga rehabilitasi dalam pemenuhan standar pelayanan SNI 8807:2022;

- 2) Adanya komitmen dan upaya nyata dari pemangku kepentingan di lembaga rehabilitasi dalam melengkapi persyaratan SNI 8807:2022 di lembaga tersebut dalam rangka peningkatan mutu layanan;
- 3) Tersedianya sumber daya baik SDM maupun fasilitas yang dapat mendukung tercapainya SNI 8807:2022 pada lembaga rehabilitasi dimaksud.

#### **d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), BNNP Papua Barat akan terus melakukan pendampingan kepada lembaga rehabilitasi akan dilaksanakan secara terencana dengan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh lembaga rehabilitasi itu sendiri. Petugas pendamping BNNP Papua Barat akan lebih proaktif dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi lembaga sehingga dapat mendorong lembaga rehabilitasi untuk memenuhi standar layanan SNI 8807:2022.

<b>9.</b>	<b>Indikator Kinerja : Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi</b>
-----------	---

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembentukan Unit IBM, Asistensi, dan Evaluasi Unit IBM

#### **a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2022 target Indikator Jumlah Unit Penyelenggaran Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi adalah 1 (satu) unit dan capaian 1 (satu) unit dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.34 Data capaian kinerja jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2 Unit	2 Unit	100%

Definisi operasional dari Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

**b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian unit IBM yang operasional adalah IBM yang operasional berada di Kelurahan Wosi dan Kampung Arowi dengan 10 Agen Pemulihan sebagai pelaksana teknis IBM. Berdasarkan Surat Deputi Rehabilitasi Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN tentang Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023, IBM Kelurahan Wosi dan Kampung Arowi yang dibina oleh BNNP Papua Barat berada pada Fase Tangguh. Sehingga pada tahun 2023 BNNP Papua Barat telah mencapai target Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi sebanyak 2 unit, capaian tersebut mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2022 sebanyak

1 unit yang terletak di Kelurahan Sanggeng Kabupaten Manokwari. Berikut perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya :

*Tabel 3.35 Perbandingan realisasi kinerja jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Tahun 2023 sebanyak 2 Unit atau lebih banyak 1 Unit dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat dengan target 1 Unit IBM. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.36 Perbandingan realisasi kinerja jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1 Unit	2 Unit

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.37 Tingkat efisiensi kinerja jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat (IBM) di wilayah provinsi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	100	98,87	1,13

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,13%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah:

- 1) Keaktifan serta sinergitas antara Petugas Pendamping IBM BNNP Papua Barat dan Petugas Agen Pemulihan dalam operasional layanan IBM mencakup pemetaan, penjangkauan, pendampingan, sosialisasi, layanan wajib, layanan pilihan, dan bina lanjut.
- 2) Adanya dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan IBM, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan/pemulihan bagi penyalahguna narkoba dengan tingkat resiko *low threshold*.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM, BNNP Papua Barat mengintensifkan sosialisasi bahaya Narkoba dan mensosialisaikan program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba, serta meningkatkan peran stakeholder untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba. Selain itu kedepan akan disepakati bersama waktu untuk melaksanakan kegiatan pengarah dan pelatihan, serta ersinergi lebih baik dengan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemberantasan, sehingga upaya pemulihan dapat lebih komprehensif.

# 10.

## Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat adalah 3,30 (tiga koma tiga kosong) dengan capaian tahun 2023 sebesar 3,82 (tiga koma delapan dua) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.38 Data capaian indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,30 Indeks	3,82 Indeks	115%

Definisi operasional dari Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah pengukuran dengan subjek klien yang telah mengikuti layanan rehabilitasi di BNNP Papua Barat minimal 3 kali pertemuan sebagai bentuk implementasi kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan secara berkala sebagaimana amanah Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Tujuan pelaksanaan pengukuran Memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi di lingkungan BNN yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*).

### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Indeks kepuasan layanan Masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada klien dan diinput nilainya melalui Format yang telah disediakan oleh Direktorat Pascarehabilitasi BNN RI melalui <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id>

menggunakan skala likert mencakup 9 aspek penilaian, yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana. Sehingga didapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah 3,82 atau dalam kategori Sangat Baik, capaian tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2022 yang memperoleh nilai sebesar 3,66. Berikut perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya :

*Tabel 3.39 Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks	3,2 Indeks	3,30 Indeks	3,2 Indeks	3,66 Indeks	3,82 Indeks

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3,82}{3,30} \times 100 = 115\%$$

Dari data diatas capain Indikator Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2023 sebesar 3,82 melebihi target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sebesar 3,2. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	3,2 Indeks	3,82 Indeks

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.41 Tingkat efisiensi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	115	100	15

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target capaian Indeks kepuasan Masyarakat adalah

- 1) Koordinasi dan sinergitas yang baik antara BNNP Papua Barat dengan klien serta penyelenggara layanan rehabilitasi sehingga klien dapat melengkapi data survey;
- 2) Pemahaman klien terhadap butir-butir skala sehingga sebelum dilaksanakan pengukuran, peran petugas pemberi informasi/ administrasi tes dalam memastikan pemahaman klien sangatlah penting untuk mendapatkan keakuratan data;
- 3) Jaringan internet yang memadai, karena pengukuran skala menggunakan instrumen online.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan capaian Indeks kepuasan Masyarakat, BNNP melakukan pendataan terhadap klien yang telah menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Kasuari BNNP Papua Barat, sehingga pengisian instrumen/ skala pengukuran dapat efisien dan tepat waktu, serta jika terdapat error pada pengukuran dapat dilakukan pengukuran ulang. Serta meningkatkan pelayanan dengan segala keterbatasan agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

# 11.

## Indikator Kinerja : Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Sasaran Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika.

### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup sebesar 68% (enamv puluh delapan persen) dengan capaian sebesar 98,75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.42 Data capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68%	98,75%	145%

Definisi operasional Persentase penyalahguna yang mengalami peningkatan hidup adalah persentase dari jumlah klien yang menjalani layanan pascarehabilitasi di BNNP Papua Barat dan mengalami peningkatan kualitas hidup dengan evidence berupa peningkatan skor perolehan skala WHOQoL-BREF pada saat pengukuran awal yaitu sebelum mengikuti layanan pascarehabilitasi dan pada saat pengukuran akhir yaitu setelah klien selesai mengikuti layanan pascarehabilitasi. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen WHOQoL-BREF dan Roda Kehidupan dengan data bersifat kualitatif.

### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup adalah dengan menggunakan instrumen WHOQoL-BREF yang disusun oleh

WHO. WHOQoL terdiri dari 4 domain yang mengukur fisik, psikologis, sosial dan lingkungan pecandu/penyalahguna. Instrumen ini terdiri dari skala 1 sampai 5. Nilai akhir diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai/skor akhir pada setiap domain kemudian ditransformasikan ke nilai 0-100 (sesuai norma). Berdasarkan surat dari Deputi Rehabilitasi Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup T.A 2023 dimana BNNP Papua barat memperoleh hasil Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup sebesar 98.75%.

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{98,75}{68} \times 100 = 145\%$$

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.41 Tingkat efisiensi kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	145	100	45

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 45%.

**e. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target capain Indeks kepuasan Masyarakat adalah

- 1) Perencanaan kegiatan layanan pascarehabilitasi yang sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku, sehingga proses pemulihan berkelanjutan dapat berjalan efektif dan efisien.

- 2) Adanya pemahaman petugas yang baik terhadap instrumen WHOQoL-BREF dan Roda Kehidupan, sehingga interpretasi data hasil pengukuran dapat lebih komprehensif.

**f. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup, BNNP Papua Barat melakukan dengan meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi terkait pelaksanaan layanan rehabilitasi berkelanjutan, sehingga upaya pemulihan lebih signifikan berpengaruh terhadap klien

**12. Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21**

Sasaran Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

**c. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 adalah 5 (lima) berkas dan realisasi capaian tahun 2023 sebanyak 4 (empat) berkas dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.42 Data capaian jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	5 Berkas	4 Berkas	80%

Definisi operasional Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tindak pidana Narkotika yang telah lengkap dan telah diterima oleh Kejaksaan untuk

diperiksa kelengkapannya, apabila sudah memenuhi syarat maka akan dilimpahkan ke Pengadilan.

**d. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba P21 adalah melalui kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba yang telah dilaksanakan BNNP Papua Barat selama Tahun 2023 yang telah dikirim ke Kejaksaan dan telah diperiksa kelengkapannya. Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba P21 dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.43 Data Berkas Perkara Tersangka P-21*

NO	TERSANGKA	STATUS	TANGGAL LKN	TANGGAL P-21
1	Michael Hamokwarong	P-21	20 Januari 2023	09 Mei 2023
2	Mark Marthin Ongge	P-21	13 Februari 2023	18 April 2023
3	Husein	P-21	13 Februari 2023	16 Juni 2023
4	Gerry dan Nicolas	P-21	13 Februari 2023	16 Juni 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Yang P-21 BNNP Papua Barat Tahun 2023 sebanyak 8 Berkas Perkasara, Capaian tersebut meningkat dari capaian Tahun 2021 yang berjumlah 7 Berkas Perkara. Berikut perbandingan capaian jumlah berkas perkara tindak pidana Narkoba dan precursor narkoba yang P-21 Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.44 Perbandingan realisasi kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana Narkoba dan precursor narkoba yang P-21.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Yang P-21	5 Berkas Perkara	7 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	7 Berkas Perkara	8 Berkas Perkara	4 Berkas Perkara

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{8}{7} \times 100 = 114\%$$

Dari data diatas capain Indikator Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21 BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2023 sejumlah 4 berkas perkara, capaian tersebut tidak sesuai target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sejumlah 5 berkas perkara. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.45 Perbandingan realisasi kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang P-21 Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	5 Berkas Perkara	4 Berkas Perkara

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.46 Tingkat efisiensi kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yang P-21.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	80	100	-20%

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -20%.

#### e. Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21 sebesar 80% adalah :

- 1) Terdapat 3 Berkas yang masih dalam tahap penyidikan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TERSANGKA</b>	<b>STATUS</b>	<b>TANGGAL LKN</b>
1	Agus	Penyidikan	27 November 2023
2	Jusri	Penyidikan	27 November 2023
3	Arfan	Penyidikan	27 November 2023

- 2) Kurangnya jumlah SDM dalam menangani proses penyidikan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
- 4) Komitmen yang tinggi pimpinan dan tim pembarnatasan BNNP Papua Barat dalam mengungkap peredaran gelap narkoba.

**f. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha untuk memerangi peredaran gelap Narkotika, maka upaya dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan penambahan SDM untuk mempercepat proses penyidikan agar segera P-21;
- 2) Memetakan kembali jaringan sindikat peredaran gelap narkotika yang beroperasi di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- 3) Meningkatkan sarana dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan intelijen berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan kemampuan personil intelijen untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

<b>13.</b>	<b>Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan</b>
------------	---

Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan adalah 100 (seratus) dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100 (seratus) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.47 Data capaian nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi : tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

#### **b. Metode Pengukuran**

Definisi dari Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan adalah pelayanan perawatan dan pengawasan tahanan tindak pidana narkoba dan tahanan TPPU hasil tindak pidana narkoba. Adapun metode pengukurannya adalah dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Dimana tahun 2023 tahanan masuk dan keluar dengan jumlah yang sama yaitu 5 tersangka. Capaian Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan BNNP Papua Barat Tahun 2023 sama dengan capaian Tahun 2022 yaitu dengan Indeks 100. Berikut perbandingan capaian Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.48 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanannya.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan BNNP Papua Barat Tahun 2023 sama dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 100. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.49 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanannya Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.50 Tingkat efisiensi kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanannya.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	99,96	0,04

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,04%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Tingkat Keamanan dan Ketertiban Kesehatan Tahanan yaitu terjaganya sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengawasan Tahanan. Kendala yang dihadapi belum adanya Ruang Tahanan yang lebih memadai.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha untuk memerangi peredaran gelap Narkotika, maka rencana aksi dan strategi kedepan yaitu nenpererat sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan tahanan, dikarenakan BNNP Papua Barat sampai saat ini belum memiliki Kantor dan Ruang Tahanan yang memadai.

<b>14.</b>	<b>Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika</b>
------------	--

Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan non Narkotika.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah 100 (seratus) dan capaian 100 (seratus) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.51 Data capaian nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang

dapat mempengaruhi Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti hilangnya a barang bukti atau rusaknya barang bukti.

**b. Metode Pengukuran**

Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika adapun metode pengukurannya adalah dengan tingkat pengawasan dan pemeliharaan dan pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tidak ada masalah seperti barang bukti hilang, kecuali adanya penyusutan untuk keperluan penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan mendata, mengamankan, dan mengawasi barang bukti Narkotika dan Non Narkotika serta melakukan pemusnahan barang bukti apabila berkas sudah P21 dengan disaksikan stakeholder yang bersangkutan. Berikut data Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2023 :

*Tabel 3.52 Daftar jumlah barang bukti.*

NO	BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Ganja	123,233 gram
2	Sabu	10.304 gram
3	Tas Ransel	2 Buah
4	Handphone	3 Buah
5	Tas Koper	1 Buah
6	Tas Jinjing	3 Buah
7	Mobil	1 Unit

Capaian Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika BNNP Papua Barat Tahun 2023 sama dengan capaian Tahun 2022 yaitu dengan Indeks 100. Berikut perbandingan capaian kinerja Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.53 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika BNNP Papua Barat Tahun 2023 sama dengan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 100. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.54 Perbandingan realisasi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.55 Tingkat efisiensi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	91,67	8,33

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,33%.

### **c. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana BNNP Papua Barat Berupaya untuk bekerja secara professional. Kendala yang dihadapi dalam

pencapaian sasaran ini yaitu belum adanya penyimpanan barang bukti Narkotika yang terkhusus untuk Seksi Wastahti dan untuk sementara narkotika di simpan di dalam brangkas penyimpanan senjata api organik BNNP Papua Barat.

**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

BNNP Papua Barat akan mempertahankan kinerja dalam memerangi Narkoba dan Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil

**15. Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat**

Sasaran Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat adalah 80 (delapan puluh) dan capaian 86,22 (delapan puluh enam koma dua puluh dua) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.56 Data capaian nilai kinerja anggaran.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	80 Indeks	86,22 Indeks	107,77%

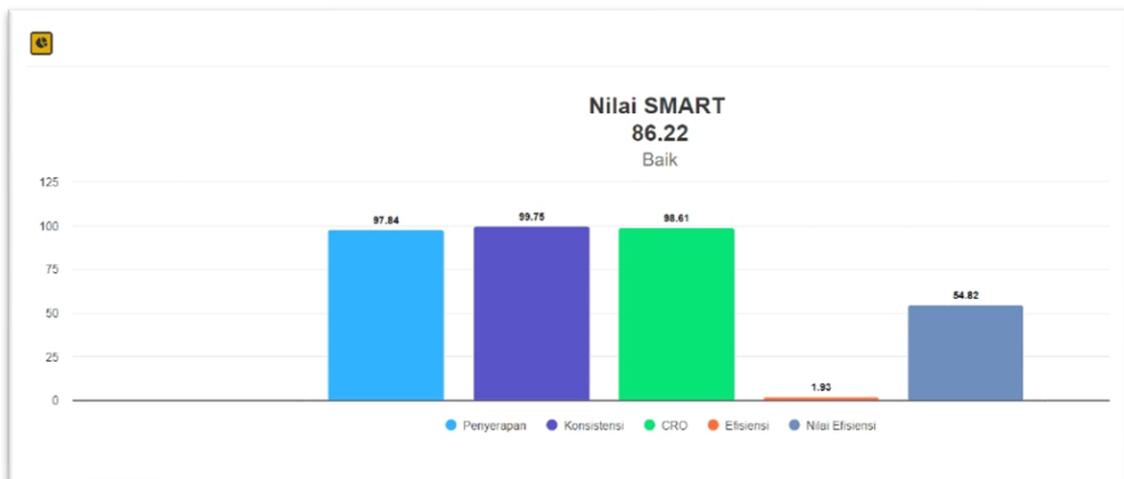
Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNNP yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

**b. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks

terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan. yang tersedia pada aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id>. Berikut hasil dari perhitungan Nilai Kinerja Anggaran :

*Gambar 3.1 Hasil indeks nilai kinerja anggaran*



Dari data diatas BNNP Papua Barat Tahun 2023 memperoleh Indeks sebesar 86,22, hasil tersebut jauh meningkat dari capaian Tahun 2022 sebesar 69,46. Berikut perbandingan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.57 Perbandingan realisasi kinerja nilai kinerja anggaran.*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	90	88	80	86,78	69,46	86,22
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{86,22}{80} \times 100 = 107,77\%$$

Dari data diatas capain Indikator Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2023 dibawah target Rencana Program Kerja Jangka Menengah

(Renproja) BNNP Papua Barat yaitu dengan indeks 94. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.58 Perbandingan realisasi kinerja nilai kinerja anggaran Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	94	86,22

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.59 Tingkat efisiensi kinerja nilai kinerja anggaran.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	107,77	92,75	15,02

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,02%.

#### **c. Faktor Penyebab Kegagalan**

Faktor target Nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat sebesar 107,77% atau dengan Indeks 86,22 adalah perencanaan kegiatan yang telah direncanakan walaupun terjadi *Automatic Adjustment* dapat dimaksimalkan, selain itu koordinasi dengan bidang yang melaksanakan kegiatan dan bagian keuangan dapat dikondisikan secara efektif.

#### **d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNNP Papua Barat, maka upaya dan strategi ke depan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada BNNP Papua Barat dengan terus meningkatkan sinergitas dengan semua bidang.

# 16.

## Indikator Kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur.

### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat adalah 92 (sembilan puluh dua) dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 97,56 (sembilan puluh tujuh koma lima puluh enam) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.60 Data capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	92 Indeks	97,56 Indeks	106%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring SPAN* yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat adalah dilihat dari kesesuaian

perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang tersedia pada aplikasi OMSPAN dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Gambar 3.2 Hasil indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).*

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	065	066	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	80.06	100.00	100.00	100.00	97.51	100.00	99.20	97.56	100%	97.56
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.01	20.00	10.00	10.00	9.75	5.00	24.80			
					Nilai Aspek		90.03			99.50			99.20			

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat Tahun 2023 sebesar 97,56, Capaian tersebut mengalami kenaikan dari capaian Tahun 2022 dengan indeks sebesar 96,77. Berikut perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

*Tabel 3.61 Perbandingan realisasi kinerja indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).*

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	94	95	92	98,27	96,77	97,56
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{97,56}{92} \times 100 = 106\%$$

Dari data diatas capain Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat Tahun 2023 sebesar 97,56, hasil tersebut melebihi sedikit dari target Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNNP Papua Barat sebesar 97. Berikut perbandingannya :

*Tabel 3.62 Perbandingan realisasi kinerja indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA Tahun 2023 dengan Renproja BNNP Papua Barat.*

NO	INDIKATOR	RENPROJA	REALISASI 2023
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	97	97,56

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.63 Tingkat efisiensi kinerja indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	106	97,94	8,06

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,06%.

### c. Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat melebihi 100% adalah Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan tepat sasaran. Kendala yang dihadapi yaitu adanya *Automatic Adjustment* sehingga harus menyesuaikan kinerja dengan anggaran yang ada.

### d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran BNNP Papua Barat, maka upaya dan strategi ke depan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada BNNP Papua Barat dengan melihat pengalaman tahun 2023.

# 17.

## Indikator Kinerja : Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal.

### a. Capaian Indikator Kinerja

Perjanjian kinerja BNNP Papua Barat Tahun 2023 target Indikator Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal BNNP Papua Barat adalah 75 (tujuh puluh lima) dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 74,52 (tujuh puluh empat koma lima puluh dua) dengan rincian capaian sebagai berikut :

*Tabel 3.64 Data capaian nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal.*

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	74,52 Indeks	99,36%

Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas BNNP Berdasarkan Penilaian Internal adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana terdapat 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capain Nilai Zona Integritas BNNP Papua Barat adalah dengan melihat Pemenuhan, Reform dan Hasil dari setiap area perubahan. Berdasarkan surat Inspektur Utama BNN RI Nomor : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP

Tahun 2023 dimana BNNP Papua Barat mendapatkan nilai sebesar 74,52 di tahun 2023

*Perhitungan Capaian :*

$$\% \text{ Capaian} = \frac{74,52}{75} \times 100 = 99,36\%$$

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.65 Tingkat efisiensi kinerja nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal.*

NO	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	99,36	97,90	1,46

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,46%.

**c. Faktor Penyebab Kegagalan**

Faktor kegagalan pencapaian target nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal adalah :

- 1) Dukungan jumlah SDM yang masih kurang jauh dari DSP untuk mendukung terciptanya Zona Integritas;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perubahan dan perbaikan layanan terhadap Masyarakat, Dimana kantor BNNP Papua Barat masih status kontrak ruko 2 lantai.

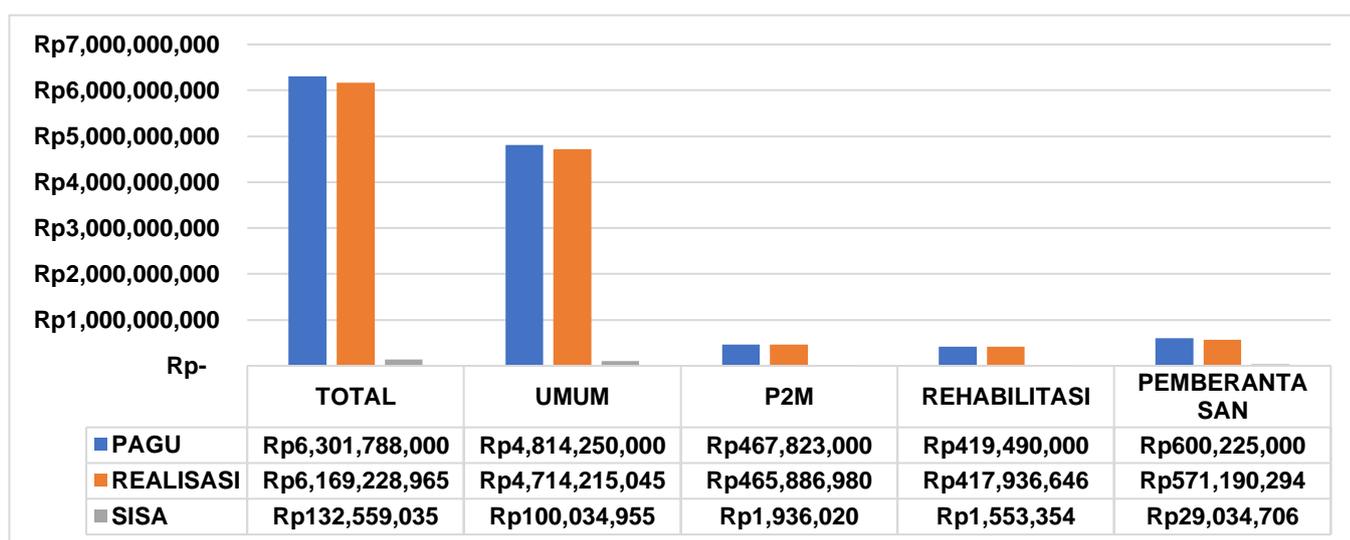
**d. Upaya Nyata dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan nilai zona integritas BNNP berdasarkan penilaian internal, BNNP Papua Barat memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk terus menggenjot Zona Intgritas menuju WBBM dan WBK dengan segala keterbatasan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 BNNP Papua Barat mendapat total alokasi anggaran **Rp6.301.788.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan realisasi keuangan **Rp6.169.228.965,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar 97,90% dengan sisa anggaran sebesar **Rp132.559.035,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)** atau setara dengan 2,10%. Dalam perjalanan Tahun Anggaran 2023 BNNP Papua Barat mendapatkan *Automatic Adjustment* sehingga mengakibatkan BNNP Papua Barat harus melakukan efisiensi anggaran untuk dapat menunjang kegiatan di BNNP Papua Barat. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran BNNP Papua Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

*Gambar 3.3 Data Pagu dan Realisasi Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2023*



*Tabel 3.66 Data Realisasi Anggaran BNNP Papua Barat Tahun 2023*

KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>6,301,788,000</b>	<b>6,169,228,965</b>	<b>132,559,035</b>	<b>97.90%</b>
<b>BAGIAN UMUM</b>		<b>4,814,250,000</b>	<b>4,714,215,045</b>	<b>100,034,955</b>	<b>97.92%</b>
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,265,899,000	1,240,543,126	25,355,874	98.00%
3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,022,000	300,000	722,000	29.35%
3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	27,387,000	12,437,000	14,950,000	45.41%
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	55,856,000	51,804,244	4,051,756	92.75%

KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
3239.EBA.962	Layanan Umum	430,725,000	419,925,000	10,800,000	97.49%
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,084,619,000	2,044,440,775	40,178,225	98.07%
3239.EBB.951	Layanan Sarana Internal	926,608,000	925,499,900	1,108,100	99.88%
3239.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2,000,000	1,821,000	179,000	91.05%
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20,134,000	17,444,000	2,690,000	86.64%
<b>BIDANG P2M</b>		<b>467,823,000</b>	<b>465,886,980</b>	<b>1,936,020</b>	<b>99.59%</b>
3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	39,948,000	52,000	99.87%
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	36,406,000	35,467,000	939,000	97.42%
3248.BDD.001	Fasilitasi Program Alternative Development Pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	130,000,000	129,469,200	530,800	99.59%
3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	194,820,000	194,527,780	292,220	99.85%
5936.QDB.001	SMP dan SMU Sederajat Yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	66,597,000	66,475,000	122,000	99.82%
<b>BIDANG REHABILITASI</b>		<b>419,490,000</b>	<b>417,936,646</b>	<b>1,553,354</b>	<b>99.63%</b>
3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	37,117,000	37,117,000	-	100.00%
3259.ADG.001	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat Yang Diberikan Pelatihan	17,375,000	17,375,000	-	100.00%
3259.ADI.001	Tenaga Rehabilitasi Yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	106,618,000	106,376,449	241,551	99.77%
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	51,925,000	51,325,000	600,000	98.84%
3260.BAA.004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	78,184,000	78,184,000	-	100.00%
3260.BAA.005	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A	200,000	200,000	-	100.00%
3260.BAA.006	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-B	280,000	280,000	-	100.00%
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	59,188,000	59,146,287	41,713	99.93%
3260.BDB.003	Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota	9,553,000	9,550,910	2,090	99.98%
3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional	59,050,000	58,382,000	668,000	98.87%
<b>BIDANG PEMBERANTASAN</b>		<b>600,225,000</b>	<b>571,190,294</b>	<b>29,034,706</b>	<b>95.16%</b>
3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	50,000,000	49,961,280	38,720	99.92%
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	44,025,000	20,050,000	23,975,000	45.54%
3258.BIA.002	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-narkotika	60,000,000	55,000,000	5,000,000	91.67%
3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU	42,200,000	42,184,000	16,000	99.96%
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	404,000,000	403,995,014	4,986	100.00%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2023 menyajikan hasil dari capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, namun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan berbagai upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Tahun Anggaran 2023 dari 17 target indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 13 indikator dapat mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Realisasi anggaran BNNP Papua Barat mencapai Rp6.169.228.965,- atau 97,90% dengan sisa anggaran sebesar Rp132.559.035,- atau setara dengan 2.10% anggaran tidak terserap.

#### **B. Saran dan Harapan**

- Penguatan Personil BNNP Papua Barat dengan penambahan Pegawai PNS/Polisi/TNI agar mendekati jumlah minimal pegawai sesuai DSP, serta pengembangan SDM yang ada di BNNP Papua Barat dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan kepada Personel/staf untuk mencapai kerja yang Profesional.
- Mengoptimalkan Koordinasi, dukungan, dan peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam program P4GN di Provinsi Papua Barat.
- Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.

**LAMPIRAN**

# LAMPIRAN I : HASIL PERHITUNGAN DEKTARI DIREKTORAT ADVOKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

---

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN Jakarta, 27 Desember 2023  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Sber dan Sandi Negara.

2

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
- Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
  - Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 111 Satker
  - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
  - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
  - Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 10 Satker
- Hasil Penghitungan Terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,  
M.M., M.B.A.

Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Sber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO</b>	<b>52.57</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA</b>	<b>49.66</b>	<b>Rendah</b>
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT</b>	<b>45.00</b>	<b>Sangat Rendah</b>
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,  
M.M., M.B.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Sber dan Sandi Negara.

## LAMPIRAN II : HASIL PERHITUNGAN DEKTARA DIREKTORAT ADVOKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

---

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN Jakarta, 27 Desember 2023  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Kepada  
 Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di  
 Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

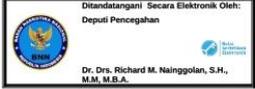
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba  
Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

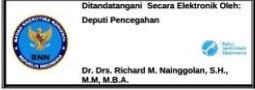
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 Deputy Pencegahan  
 Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,  
 M.M., M.B.A.

Tembusan :  
 1. Kepala BNN;  
 2. Sekretaris Utama BNN;  
 3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	<b>BNNP PAPUA</b>	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	76,696	TINGGI
<b>NILAI DEKTARA TAHUN 2023</b>		<b>85,389</b>	<b>TINGGI</b>

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 Deputy Pencegahan  
 Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,  
 M.M., M.B.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# LAMPIRAN III : HASIL PERHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

---

Nomor : B/100/II/DE/PM.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada  
Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di  
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari tiap BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian ....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Heri Maryadi, M.M.

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/100/II/DE/PM.00/2024/BNN  
TANGGAL : 15 Januari 2024

195	BNNK Gorontalo Utara	3.46		3.63		3.55	Sangat Mandiri	A
196	BNNK Boalemo			3.08	3.32	3.2	Mandiri	B
197	BNNP Maluku			3.57	3.6	3.585	Sangat Mandiri	A
198	BNNK Tual	3.8			3.2	3.5	Sangat Mandiri	A
199	BNNK Buru Selatan		3.24	3.84		3.54	Sangat Mandiri	A
200	BNNP Maluku Utara	3.62		3.44		3.53	Sangat Mandiri	A
201	BNNK Pulau Morotai	3.2		3.68		3.44	Sangat Mandiri	A
202	BNNK Halmahera Utara	3.2			3.12	3.16	Mandiri	B
203	BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32		3.28		3.3	Sangat Mandiri	A
204	BNNP Papua	3.19			3.23	3.21	Mandiri	B
205	BNNK Mimika	3.23			3.23	3.23	Mandiri	B
206	BNNK Jayapura	3.14			3.29	3.22	Mandiri	B
207	BNNP Papua Barat	3.5			3.17	3.335	Sangat Mandiri	A
	<b>Nilai akhir IKP Tahun 2023</b>	<b>3.49</b>	<b>3.5</b>	<b>3.49</b>	<b>3.51</b>	<b>3.5</b>	<b>Sangat Mandiri</b>	<b>A</b>



**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Heri Maryadi, M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# LAMPIRAN IV : HASIL PERHITUNGAN INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN BNP PAPUA BARAT TAHUN 2023

Responden 1. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3		2				6
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	1				5	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1				4	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			4		8	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	2				14	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	2				12	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	2				10	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3			3		9	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			3		3	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					194	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 194/79 = 2,48

Responden 2. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3		2				6
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	1				5	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1				4	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			4		8	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	2				14	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	2				12	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	2				10	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3			3		9	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			3		3	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					195	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 195/79 = 2,44

Responden 3. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3			2			6
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	2				10	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1				4	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			3		6	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	2				14	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	2				12	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	1				5	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3	1				3	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			2		2	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					201	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 201/79 = 2,54

Responden 4. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3			4			12
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	2				10	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1		3		12	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			3		6	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	1				7	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	1				6	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	1				5	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3	1				3	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			1		1	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					191	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 191/79 = 2,41

Responden 5. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3		2				6
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	1				5	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1				4	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			2		4	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	1				7	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	1				6	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	1				5	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3	1				3	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			1		1	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					153	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 153/79 = 1,93

Responden 6. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3			4			12
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	1				5	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1				4	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			3		6	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	1				7	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	1				6	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	1				5	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3	1				3	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			1		1	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					178	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 178/79 = 2,25

Responden 7. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BOBOT	JAWABAN					JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1		BANDAR NARKOBA	8					4	32
2		PRODUKSI NARKOBA	7					4	28
3	INDIKATOR	ENTRI POINT NARKOBA	6	2					12
4		KURIR NARKOBA	5			4			20
5	POKOK KERAWANAN NARKOBA	PELACANDU NARKOBA	4	1					4
6		KASUS NARKOBA	3			4			12
7		BARANG BERTI NARKOBA	2		2			4	
8		KESEHATAN UMUM	1		2			2	
9		TEMPAT HIBURAN	5	2				10	
10	INDIKATOR	ANGKAEKSEKUSI	4	1				4	
11		KOS KOSAN	3	1				3	
12	PENDUKUNG	SARANA PUBLIK	2			3		6	
13		INTERAKSI SOSIAL	1	2				2	
14		HASIL YANG DILAKUKAN MASY	7	1				7	
15		KEBERLANJUTAN PROGRAM	6	1				6	
16	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	5	1				5	
17		PELAKSANA PROGRAM	4			4		16	
18		SINERGI INSTANSI PEMERINTAH	3	1				3	
19		KEMITRAAN DUNIA USAHA	2	1				2	
20		DAMPAK KEBERDAYAAN MASY	1			1		1	
JUMLAH TOTAL (N = 1)			79					192	

Total Jumlah dibagi jumlah Bobot, sehingga 192/79 = 2,43

Jumlah Total Nilai Responden :

N1 nilainya 2,48 N2 nilainya 2,44 N3 nilainya 1,93  
N4 nilainya 2,46 N5 nilainya 2,41 N6 nilainya 2,25  
N7 nilainya 2,43

Dengan data tersebut maka IKKR dapat dihitung sebagai berikut:

$(2,48 + 2,46 + 2,44 + 1,93 + 2,25 + 2,43) : 7 = 19,6 : 7 = 2,81$

Nilai 2,81 dimasukkan dalam tabel d bawah ini:

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONSEPSI	KATEGORI IKKR	KRITERIA PELUJ
1,80 - 1,70	10,00 - 10,00	A	BENIH
1,70 - 1,50	10,00 - 10,00	B	WASAPDA
1,50 - 1,25	10,00 - 10,00	C	SIKAP
1,25 - 1,00	10,00 - 10,00	D	JAHAT

Dengan demikian nilai IKKR hasilnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Nilai IKKR belah dikoreksi = 2,37 (B)

b. Nilai Interval (posisi nilai IKKR) = antara 1,76 - 2,50

c. Nilai Interval Koreksi dikalikan 25 = 2,37 x 25 = 59,25

d. Kategori IKKR = B

e. Kriteria Keterpulihan WASPADA.

# LAMPIRAN V : HASIL EVALUASI OPERASIONAL UNIT IBM BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2023

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**  
 Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur  
 Telp: (62-21) 80871566, 80871567  
 Faksimil: (62-21) 80865226, 80871591, 80871592, 80871593  
 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/1/DR/RH.02.03/2024/IBN Jakarta, 02 Januari 2024  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 4 (empat) berkas  
 Perihal : Pembentahan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023

Kepada  
 Yth: **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**  
**2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia**

di  
**Tempat**

1. Rujukan:  
 a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
 b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
 c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;  
 d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;  
 e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH/03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Pertama Tahun Anggaran 2023;  
 f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/259/II/DE/RH/03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Kedua Tahun Anggaran 2023;  
 g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/196/IX/DE/RH/01/00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Ketiga Tahun Anggaran 2023;  
 h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4380/X/DR/RH.02.03/2023/IBN tanggal 28 November 2023 perihal Pembentahan Evaluasi Operasionalisasi IBM 2023;  
 i. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

2. Sehubungan ...

- 2 -

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bawah Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 463 unit IBM pada bulan Desember 2023. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta inovasi, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka menentukan kebijakan program pada tahun anggaran selanjutnya.

3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

**a. Fase perkembangan unit IBM**  
 Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/Kota tentang pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM. Monitoring dilakukan kepada 463 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/ kota. Dengan capaian sebagai berikut:  
 - Sebanyak 70 unit (15,12%) memenuhi fase Prima  
 - Sebanyak 209 unit (45,14%) memenuhi fase Tangguh  
 - Sebanyak 105 unit (22,68%) memenuhi fase Berkembang  
 - Sebanyak 58 unit (12,53%) memenuhi fase Tumbuh  
 - Sebanyak 16 unit (3,46%) memenuhi fase Rintisan  
 - Sebanyak 5 unit (1,08%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 442 unit (95,46%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan pengungkauan), dan telah dapat menjangkau klien untuk dilakukan skring menggunakan formulir DAST-10 (Drug Abuse Screening Test) untuk selanjutnya klien dapat diberikan layanan intervensi hingga bisa lanjut.

**b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM**  
 Merupakan gambaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2023. Berdasarkan data yang terkumpul pada bulan Desember 2023, diperoleh gambaran berikut:

i. Kegiatan ...

- 3 -

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 2.491 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial, dengan jumlah penerima sosialisasi 44.477 audiens. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan.

- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.447 kali di 2.049 RT/RW. dan perkiraan jumlah penyalah guna narkotika sebanyak 5.429 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah desa/ kelurahan.

- Kegiatan pengungkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.027 orang penyalah guna narkotika, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.825 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkotika dan keluarga orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.

- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2023 sebanyak 2.825 orang dengan profil berikut:  
 o Mayoritas klien (40,78%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun  
 o Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (54,12%)  
 o Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah Buruh/ petani/ nelayan (20,55%)  
 o Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amfetamin/ metamfetamin (37,71%), diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik (11,43%) dan kanabis (10,13%)

**c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat**  
 Merupakan hasil survey menggunakan skala likert kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.407 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 tahun dan merupakan warga di lingkungan desa/ kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (96,1%) mengetahui tingkat keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 1-4, artinya IBM memberikan dampak sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkotika.

ii. Hasil ...

- 4 -

**d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi**  
 Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditingkatkan/diikuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2024. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5, yaitu:  
 - Sumber Daya Manusia/ SDM, baik AP maupun petugas BNNP/Kota  
 - Anggaran  
 - Materi/ konten layanan yang diberikan  
 - Perilaku/ keterlibatan kegiatan & layanan  
 - Metode pelaksanaan kegiatan

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2023. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:  
 1. Kepala BNN;  
 2. Sekretaris Utama BNN;  
 3. Inspektur Utama BNN;  
 4. Deputi Rehabilitasi BNN

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi  
 Komponen Masyarakat (PLRKM)

W. Anitis Bnn, S.p.N., M.Si

No.	Provinsi	BNNP/Kota	Desa/ Kelurahan	Keramatan	Kota/ Kab
182	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Biraga	Berbon	Kabupaten Tana Toraja
183	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padalao	Mare	Kabupaten Bone
184	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Lalabulaha	Wundulaha	Kabupaten Kolaka
185	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Desa Hicru	Wundulaha	Kabupaten Kolaka
186	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Andombala	Puwaha	Kota Kendari
187	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Biranga	Manup	Kabupaten Mamuju
188	Mekong	BNNP Mekong	Kelurahan Sembang	Nasawaw	Kota Anker
189	Mekong	BNN Kab. Sngu	Desa Kemlingan	Nomnie	Kabupaten Sngu
190	Mekong	BNN Kota Tui	Kelurahan Fellen	Pulu Dulu	Kota Tui
191	Mekong	BNN Kota Tui	Kelurahan Kutubak	Mulu Dulu	Kota Tui
192	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Kawen	Bangi	Kabupaten Bangli
193	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Selat	Selat	Kabupaten Karangasem
194	Bali	BNN Kab. Karangasem	Kelurahan Botagan	Katragasah	Kabupaten Karangasem
195	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Daun Pui Kijul	Denpasar Barat	Kota Denpasar
196	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan	Kota Denpasar
197	NTS	BNNP NTS	Kelurahan Lenang	Praya	Kabupaten Lombok Tengah
198	NTS	BNN Kota Bima	Kelurahan Melayu	Asakota	Kota Bima
199	NTS	BNN Kota Mataram	Kelurahan Degan Pahan	Angaran	Kota Mataram
200	NTS	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Timur	Cakranegara	Kota Mataram
201	NTS	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Pajap	Keliring	Kabupaten Sumbawa Barat
202	NTS	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Pajap	Sepahat	Kabupaten Sumbawa Barat
203	NTS	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Kemulo	Utah Iasa	Kabupaten Sumbawa Barat
204	NTS	BNN Kab. Sumbawa	Desa Pungkit	Lopak	Kabupaten Sumbawa
205	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntula Selatan	Duhaska	Kabupaten Gorontalo
206	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntula Tengah	Buntula	Kabupaten Gorontalo
207	Papua	BNN Kab. Kaimana	Kampung Sentani	Ditih Sentani	Kabupaten Jayapura
208	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Wote	Ditih Marakwei Barat	Kabupaten Marakwei
209	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Awe	Ditih Marakwei Timur	Kabupaten Marakwei
210	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lempegang	Kroeng Betara	Kabupaten Aceh Besar
211	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gempeng Deah	Morawa	Kota Banda Aceh
212	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gempeng Löt	Kuala	Kabupaten Bireuen
213	Aceh	BNN Kota Lhokmeukha	Gempeng Seang	Sawang	Kabupaten Aceh Utara

**LAMPIRAN VI : SERTIFIKAT LEMBAGA REHABILITASI STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL (SPM) BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2023**



The certificate is framed with a black border and features decorative geometric shapes in orange, teal, and blue on the left and right sides. At the top center is the BNN logo. The main text is centered and includes the title 'SERTIFIKAT PENGHARGAAN', the number 'ST/168/XII/03/23/De.Rehab', and details about the service provided to 'Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat'. The certificate is signed by 'Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D' on December 28, 2023, with a blue circular official stamp of the BNNP Papua Barat.

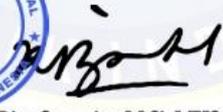
**SERTIFIKAT PENGHARGAAN**  
Nomor : ST/168/XII/03/23/De.Rehab

Dalam  
Penyelenggaraan Layanan  
Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika  
**Sesuai SNI 8807 : 2022**

Diberikan Kepada :  
**Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat**

atas keberhasilannya sebagai  
**Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Tipe III**

Jakarta, 28 Desember 2023  
Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional

  
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

# LAMPIRAN VII : INDEKS KEPUASAN LAYANAN KLINIK REHABILITASI DAN PRESENTASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**  
 Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
 Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

---

Nomor : B/99/II/DE/RH.02/2024/BNN Jakarta, 15 Januari 2024  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 2 (dua) lampiran  
 Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR Dan Presentase Peningkatan Kualitas Hidup T.A 2023

Kepada  
 Yth. **Daftar Terlampir**  
 di  
 Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Deputi Rehabilitasi



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Tembusan :  
 1. Kepala BNN;  
 2. Sekretaris Utama BNN;  
 3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.



LAMPIRAN II  
 SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/II/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

---

**HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM),  
 PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI (IKR) DAN  
 PROSENTASE KUALITAS HIDUP T.A 2023**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Presentase Kualitas Hidup
<b>Aceh</b>	<b>3,27</b>	<b>3,67</b>	<b>86,68</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,15	3,59	96,59
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	2,99	3,82	62,50
BNN Kabupaten Bireuen	3,60	3,56	90,12
BNN Kabupaten Gayo Lues	2,80	2,99	80,00
BNN Kabupaten Pidie	3,12	3,15	98,89
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,00	3,75	92,11
BNN Kota Banda Aceh	3,61	3,53	98,00
BNN Kota Langsa	3,66	3,97	68,75
BNN Kota Lhokseumawe	3,15	3,87	87,50
BNN Kota Sabang	3,16	0	98,21
BNNP Aceh	3,62	3,37	80,60
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3,46</b>	<b>3,52</b>	<b>90,24</b>
BNN Kabupaten Asahan	3,76	3,62	92,22
BNN Kabupaten Batu Bara	3,30	3,78	94,35
BNN Kabupaten Deli Serdang	3,66	3,14	88,68
BNN Kabupaten Karo	3,44	3,71	88,61
BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,38	3,71	100,00
BNN Kabupaten Langkat	3,32	3,76	81,55
BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,62	3,52	92,50
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	3,21	3	88,46
BNN Kabupaten Simalungun	3,36	3,29	91,85
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2,88	3,31	87,78
BNN Kota Binjai	3,34	3,09	86,79
BNN Kota Gunungsitoli	3,39	3,88	100,00
BNN Kota Pematang Siantar	3,62	3,77	90,34
BNN Kota Tanjung Balai	3,66	3,83	86,21
BNN Kota Tebing Tinggi	3,15	3,67	97,64
BNNP Sumatera Utara	3,90	3,56	89,78
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3,32</b>	<b>3,44</b>	<b>64,66</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,38	3,06	93,18
BNN Kabupaten Solok	3,44	3,74	47,12
BNN Kota Payakumbuh	3,53	3,64	51,47
BNN Kota Sawahlunto	3,02	3,23	100,00
BNNP Sumatera Barat	3,22	3,40	56,25



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Deputi Rehabilitasi



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.



LAMPIRAN II  
 SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/II/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

---

BNN Kota Kendari	3,66	3,56	76,61
BNNP Sulawesi Tenggara	3,41	3,57	87,50
<b>Maluku</b>	<b>3,26</b>	<b>3,34</b>	<b>86,96</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	2,97	3,18	
BNN Kota Tual	3,46	3,38	85,00
BNNP Maluku	3,35	3,53	85,00
<b>Maluku Utara</b>	<b>3,07</b>	<b>3,36</b>	<b>73,39</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	3,22		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	2,11		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3,36	3,57	72,92
BNNP Maluku Utara	3,57	3,29	75,00
<b>Papua</b>	<b>3,38</b>	<b>3,7</b>	<b>75,00</b>
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69,44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35,00
BNNP Papua	3,42	3,68	100,00
<b>Papua Barat</b>	<b>3,89</b>	<b>3,82</b>	<b>98,75</b>
BNNP Papua Barat	3,89	3,82	98,75
<b>Pusat</b>	<b>3,70</b>	<b>3,43</b>	<b>85,00</b>
IPWL BNN Pusat	3,70	3,43	85,00
<b>Grand Total</b>	<b>3,41</b>	<b>3,63</b>	<b>81,39</b>



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh:  
 a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Deputi Rehabilitasi



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# LAMPIRAN VIII : NILAI ZONA INTEGRITAS BNNP PAPUA BARAT TAHUN 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**  
 Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
 Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

---

Nomor : B/770XIII/IR.04.05/2023/INS Jakarta, 28 Desember 2023  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 1 Lembar  
 Perihal : Penyalpaaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2023

Kepada  
 Yth. Para Kepala BNNP  
 di tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

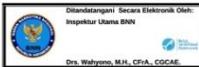
3. Berdasarkan butir dua di atas, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

menjadikan capaian Tahun 2023 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2024.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.





Dr. Wahyuni M.H., CFA, COCAE

Tembusan :  
 Sekretaris Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN  
 SURAT Sekretaris Utama BNN  
 NOMOR : B/770XIII/IR.04.05/2023/INS  
 TANGGAL : 28 Desember 2023

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pemenuhan	Reform	Jumlah
				7
16	BNNP Papua Barat	17.53	22.90	34.09
17	BNNP Lampung	24.12	21.16	28.51
18	BNNP Aceh	13.19	24.87	35.08
19	BNNP Jambi	21.04	17.08	34.66
20	BNNP Bengkulu	18.33	18.18	35.88
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	17.78	18.21	36.26
22	BNNP Nusa Tenggara Timur	16.37	19.46	35.69
23	BNNP Papua	18.43	23.90	29.13
24	BNNP Riau	23.81	29.37	18.25
25	BNNP Kalimantan Barat	17.09	18.47	35.86
26	BNNP Sulawesi Tengah	14.77	22.60	33.98
27	BNNP Sumatera Barat	20.09	16.75	34.38
28	BNNP Sulawesi Utara	21.57	22.33	26.88
29	BNNP Sulawesi Tenggara	18.08	21.18	31.25
30	BNNP DKI Jakarta	26.26	25.32	18.71
31	BNNP Maluku	14.73	24.16	31.39
32	BNNP Kalimantan Utara	14.68	20.52	34.97

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.